

PENERAPAN SYARIAT ISLAM DARI SUDUT PANDANG MEDIA DAN PEREMPUAN DI ACEH

Putri Maulina

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

Email: putrimaulina@utu.ac.id

Abstrak

Wacana penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks pemberitaan di media massa menempatkan perempuan sebagai pihak yang rentan diberitakan. Harian Serambi Indonesia merupakan salah satu media cetak lokal yang turut memberitakan kasus-kasus penegakan syariat Islam di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat wacana penegakan syariat Islam pada level pemberitaan media dan melihat bagaimana proses pemaknaan khalayak perempuan sebagai audiens aktif dalam memaknai wacana yang disampaikan oleh media. Adapun pendekatan teori yang digunakan adalah Analisis Resepsi (*Reception Analysis*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian adalah analisis semiotika Ferdinand de Saussure terhadap enam teks pemberitaan penegakan syariat Islam sepanjang tahun 2014 dan wawancara mendalam terhadap delapan informan perempuan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana dominan di Harian Serambi Indonesia adalah perempuan merupakan pihak paling rentan melakukan pelanggaran syariat Islam di Aceh. Selain itu, wacana di khalayak menggambarkan kecenderungan pemaknaan *oppositional reading* yang beranggapan bahwa pemberitaan syariat Islam di Harian Serambi Indonesia tidak memihak perempuan.

Kata Kunci : Analisis Resepsi, Syariat Islam, Harian Serambi Indonesia, Perempuan

Abstract

The discourse of the Sharia implementation in Aceh in the context of media places women as the most reported group. Serambi Indonesia is one of the local print media that has intensively covered the enforcement of Sharia in Aceh. This study aims to look at the discourse of Sharia enforcement in local media and how the female audiences as active audiences interpret the discourse conveyed by the media. The theoretical approach used in this study is Reception Analysis. This study is descriptive qualitative research. Data were collected using Ferdinand de Saussure's semiotics on six news articles of Serambi Indonesia throughout 2014 and in-depth interviews with eight female informants who were selected by purposive sampling technique. The results of the study illustrated that the dominant discourse in the media was women in Aceh were prone to violate Sharia. Findings also documented the tendency of informants to occupy oppositional reading positions that the way Serambi Indonesia covered Shariain Aceh was more likely to discriminate against women.

Keywords: Reception Analysis, Sharia, Serambi Indonesia, Women

Pendahuluan

Sejak syariat Islam secara sah diberlakukan di Aceh pada Maret 2002, kalangan perempuan Aceh berada dalam posisi yang dilematik. Dalam pemberitaan di media, isu-isu penegakan syariat Islam yang ditampilkan cenderung menyorot sosok perempuan (Maulina, 2017a). Beberapa contoh pemberitaan syariat Islam di media yang menyoroti perempuan dengan judul-judul seperti “Darah Perawan di Sprei Jadi Bukti, Digerebek! Mahasiswi Zina di Hotel” di Harian Metro Aceh, atau “Dua Pelacur ABG Ditangkap Menjelang Subuh” di Harian Prohaba, dan “Diperkosa Delapan Orang, Wanita Ini Akan Dicambuk Polisi Syariah” di Harian Kompas. Dari penggunaan bahasa yang dipakai media dalam judul berita menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki kecenderungan sebagai “pelanggar” atau “korban” bahkan digambarkan sebagai sosok “tidak bermoral”. Labelisasi negatif semakin mengukuhkan bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan dalam bentuk wacana bahasa tanpa memberikan ruang terhadap perempuan untuk berbicara.

Kasus-kasus penegakan syariat Islam yang terjadi di lapangan tersebut mendorong media untuk aktif melakukan peliputan bertemakan syariat Islam. Media massa berperan penting dalam menyeleksi isu-isu syariat Islam di dalam masyarakat yang menjamin keberagaman sudut pandang dan tidak memojokkan pihak tertentu, karena apa pun yang disiarkan oleh media dapat membentuk persepsi masyarakat.

Terkait dengan kasus penegakan aturan syariat Islam di Aceh, media memiliki kekuasaan untuk menjadikan objek pemberitaannya sebagai sosok pelanggar kemudian merepresentasikannya kepada khalayak. Seperti yang dijelaskan oleh Byerly dan Ross (2006, p. 40), bahwa cara perempuan direpresentasikan media di dalam suatu pemberitaan akan memberikan pesan penting untuk khalayak terhadap kedudukan perempuan, peran perempuan, dan kehidupan perempuan di masyarakat.

Sebagai bukti yang mempertegas adanya kecenderungan penindasan terhadap perempuan di media, AJI Kota Banda Aceh di dalam program “Media Sehat” (*Sharia News Watch*) memperlihatkan bahwa terdapat sebanyak 833 pemberitaan tentang Syariat Islam sejak Februari 2012 hingga Januari 2013. Pemberitaan tersebut berasal dari 12 media cetak dan *online* baik lokal maupun nasional yang memberitakan kasus-kasus syariat Islam. Berdasarkan pemantauan AJI tersebut, Maimun Saleh sebagai Ketua AJI Kota Banda Aceh menyatakan bahwa masih banyak isi pemberitaan tentang

isu syariat Islam yang lebih mendiskriminasi perempuan sebagai objek tersangka pelanggaran syariat dan lebih mengarahkan citra negatif kepada sekelompok perempuan (Aliansi Jurnalistik Independen, 2012).

Salah satu media lokal di Aceh yang turut serta memberitakan wacana syariat Islam adalah Harian Serambi Indonesia. Harian Serambi Indonesia sebagai media lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat Aceh seharusnya menjadi media yang berimbang dan tidak bias dalam memberitakan kasus-kasus syariat Islam. Berkaitan dengan pemberitaan penegakan syariat Islam dan bagaimana kalangan perempuan ditampilkan di Harian Serambi Indonesia, sebagai gambaran awal penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti membuat suatu analisis isi kuantitatif terhadap 20 teks pemberitaan penegakan syariat Islam di sepanjang tahun 2014. Analisis isi sederhana peneliti lakukan dengan melihat keberpihakan media berdasarkan narasumber dan *angle* yang digunakan dalam pemberitaan kasus penegakan syariat Islam di Harian Serambi Indonesia, sehingga dapat menjadi landasan apakah wacana penegakan syariat Islam yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia menampilkan asas keberimbangan untuk kepentingan publik atau justru berpihak kepada tim penegak syariat Islam.

Tabel 1. Analisis Sumber Berita Tentang Kasus-Kasus Syariat Islam di Harian Serambi Indonesia Tahun 2014

	Jumlah Berita	Pemerintah	WH/Satpol PP	Perempuan	Pihak Lainnya
Januari	2		1		1
Februari	1		1		
Maret	1	1	1		
April	1		1		
Mei	4	1	3		
Juni	5	4	3		
September	1	1			
Oktober	2	2	1		1
November	2	1			1
Desember	1		1		
Jumlah	20	10	12	-	3

Sumber: Hasil Analisis Data

Melalui analisis isi ini, terdapat sedikit gambaran yang objektif mengenai kecenderungan keberpihakan Harian Serambi Indonesia terhadap pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber pemberitaan dan bentuk pengabaian perempuan. Media

cenderung lebih menonjolkan sumber dari pemerintah, aparat penegak hukum syariat Islam atau pihak lainnya untuk memberikan keterangan. Terdapat ketidakberimbangan sumber pemberitaan yang dapat berakibat merugikan perempuan.

Kebanyakan pekerja media yang didominasi oleh laki-laki menjadi salah satu penyebab pemberitaan syariat Islam ditulis dalam sudut pandang laki-laki. Spender berpendapat bahwa laki-laki dipandang sebagai gender yang superior karena laki-laki memegang kekuasaan, sehingga menjadikan sisi maskulinitas laki-laki sebagai aturan dan selalu dihubungkan dengan sesuatu yang baik, begitu pula di dalam pemberitaan syariat Islam (Krolokke dan Sorensen, 2006, p. 68).

Perempuan sebagai objek yang sering dijadikan target operasi penegakan syariat Islam perlu mendapatkan ruang yang layak di dalam pemberitaan untuk menyalurkan sudut pandang mereka. Harian Serambi Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengonstruksi realitas yang ditemukan di lapangan sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa baik dari internal atau eksternal media (Maulina, 2017b). Suara perempuan sebagai pelaku pelanggaran syariat Islam yang tidak ditampilkan dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia diasumsikan dapat melahirkan keberagaman interpretasi perempuan untuk menanggapi permasalahan tersebut melalui proses pemaknaan terhadap pesan yang ditampilkan media.

Perempuan sebagai khalayak media bukanlah pihak yang pasif dan menerima begitu saja terhadap apa yang disampaikan oleh Harian Serambi Indonesia mengenai kasus-kasus penegakan syariat Islam di lapangan. Khalayak media, khususnya kalangan perempuan dapat memberikan berbagai pemaknaan (resepsi) terhadap pemberitaan syariat Islam yang ditampilkan Harian Serambi Indonesia. Pemaknaan khalayak terhadap teks pemberitaan media dibahas dalam suatu kajian analisis resepsi yang diperkenalkan oleh Stuart Hall. Analisis Resepsi merujuk pada sebuah komparasi antara analisis tekstual wacana media dan wacana khalayak, yang hasil interpretasinya merujuk pada konteks, seperti *cultural setting* dan *context* atas isi media (Jensen, 2002, p. 139). Hall menjelaskan bahwa pemaknaan (resepsi) khalayak dapat digambarkan melalui suatu proses yang disebut dengan *encoding-decoding*. *Encoding* merupakan suatu proses menerjemahkan pesan yang dilakukan oleh sumber, sedangkan *decoding* adalah upaya penerima dalam menerjemahkan pesan yang didapatkannya dari sumber (Davis, 2004, p. 58). Proses *encoding-decoding* ini mendorong terjadi beragam

interpretasi terhadap teks pemberitaan media dalam proses produksi dan pemaknaan. Menurut Hall, proses konsumsi khalayak terhadap pesan yang disampaikan oleh media bukanlah suatu sikap yang pasif namun menghasilkan suatu pemaknaan terhadap pesan (Davis, 2004, p. 62).

Terkait dengan proses resepsi khalayak, Hall (dalam Davis, 2004, p. 66) berpendapat bahwa khalayak bersifat aktif dan bertindak sebagai produser makna. Pemaknaan tersebut dikategorikan ke dalam tiga kategori yang disebut dengan istilah “*the three hypothetical positions*”, yaitu posisi yang menyetujui penuh pemaknaan dominan yang ditawarkan oleh media (*Dominant Reading*), posisi yang cenderung menyetujui namun diiringi oleh pemahaman dari masing-masing khalayak (*Negotiated Reading*), dan posisi yang menolak penuh pemaknaan yang ditawarkan media (*Oppositional Reading*) (Marris dan Tornham, 1986, pp. 474-475).

Beranjak dari pandangan Stuart Hall (dalam Davis, 2004, p. 66) tersebut, maka perempuan sebagai khalayak media dapat bersikap aktif dalam memaknai pemberitaan bertemakan syariat Islam yang ditampilkan di Harian Serambi Indonesia. Khalayak tidak pasif dan menerima begitu saja terhadap apa yang disampaikan oleh media, namun mereka memiliki pemaknaan tersendiri berlandaskan pada latar belakang masing-masing (McQuail, 1997). Sehingga khalayak dapat menerima secara penuh apa yang disampaikan oleh media, menerima makna media namun memiliki pemahaman tersendiri, atau bisa saja khalayak memiliki pemaknaan yang bertolak belakang dan bahkan menolak penuh terhadap apa yang disampaikan oleh media mengenai pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Contoh kajian terdahulu yang juga membahas tentang proses resepsi khalayak media terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Fitri (2015). Hasil kajian ini menunjukkan terdapat makna dominan yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia yang menggambarkan sudut pandang pemerintah dan pihak-pihak pro Qanun Jinayah sehingga membungkam keberadaan non-Muslim Banda Aceh. Sedangkan dari sisi khalayak media memunculkan keberagaman interpretasi dalam memaknai kebijakan syariat Islam, yaitu dari enam informan terdapat tiga informan yang berada dalam posisi *dominant reading* dan *negotiated reading*, sedangkan tiga informan lainnya berada pada posisi *oppositional reading* (Fitri, 2015).

Penelitian kajian resepsi khalayak terhadap wacana syariat Islam juga pernah ditelaah oleh Nisa (2017) pada teks pemberitaan di media *online* *kompas.com*. Kajian tersebut juga menunjukkan hasil resepsi bahwa terdapat keberagaman proses resepsi khalayak terhadap teks pemberitaan syariat Islam di *kompas.com*, yang menunjukkan posisi pembacaan dominan berada pada kategori *oppositional reading*, kemudian disusul pada kategori *negotiated reading*, dan paling sedikit terdapat pada kategori *dominant reading*. Artinya, proses resepsi khalayak terhadap teks syariat Islam lebih cenderung menolak terhadap apa yang disampaikan oleh media (Nisa, 2017, p. 80-81).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji secara lebih dalam dari sisi perempuan sebagai bagian dari khalayak *Harian Serambi Indonesia*. Perempuan sebagai khalayak media dipandang memiliki sudut pandang tersendiri dan secara aktif dapat memaknai pesan yang disampaikan media mengenai kasus penegakan aturan syariat Islam. Penerimaan perempuan terhadap pesan yang disampaikan media bergantung pada pengalaman masing-masing. Secara konseptual, perempuan sebagai khalayak mengonsumsi media dengan berbagai cara dan kebutuhan. Dengan merujuk pada pendekatan interpretif yang menekankan pada pengalaman subyektif (*meaning-construction*) seseorang dalam memahami suatu fenomena (Hadi, 2009). Maka melalui proses resepsi khalayak, akan diperoleh beragam pemaknaan khalayak perempuan terhadap pemberitaan kasus-kasus penegakan syariat Islam di Aceh. Proses resepsi tersebut akan menggambarkan bagaimana komparasi antara wacana yang dimunculkan media dan wacana yang diterima khalayak mengenai kasus syariat Islam dalam tataran makna.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana *Harian Serambi Indonesia* menciptakan teks pemberitaan kasus penegakan syariat Islam dan makna dominan yang dibawanya, juga melihat bagaimana proses penerimaan informan khususnya khalayak perempuan dalam memaknai pemaknaan dominan yang ditampilkan oleh *Harian Serambi Indonesia* terkait wacana penegakan syariat Islam di Aceh. Melalui pemaknaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap teks pemberitaan kasus penegakan syariat Islam di *Harian Serambi Indonesia*, dapat menjadi sarana bagi mereka untuk menampilkan sudut pandang tersendiri yang berbeda bahkan mengkritisi proses implementasi syariat Islam yang ditampilkan di *Harian Serambi Indonesia*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, dengan menggunakan paradigma berpikir interpretatif. Paradigma ini menggambarkan proses pikiran aktif untuk mengingat kembali pengalaman individu atas kejadian apa pun yang dialaminya (Febrian, 2012). Pendekatan penelitian adalah model analisis resepsi, yaitu melihat pada dua level analisis yaitu pemaknaan oleh media dalam teks pemberitaan dan pada level selanjutnya pemaknaan secara aktif oleh khalayak media terhadap apa yang ditawarkan oleh media massa.

Subjek di dalam penelitian ini adalah teks pemberitaan kasus penegakan syariat Islam di Harian Serambi Indonesia pada edisi tahun 2014 dan khalayak media yaitu kalangan perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang berbeda. Data primer pertama dalam penelitian ini adalah hasil analisis teks pemberitaan kasus penegakan syariat Islam dan hasil wawancara terhadap informan penelitian. Untuk analisis teks, dari 20 berita kasus penegakan syariat Islam yang dipublikasikan oleh Harian Serambi Indonesia sepanjang tahun 2014, dipilih secara acak sebanyak enam berita yang memiliki relevansi dengan penelitian dan melibatkan kalangan perempuan. Sebagai batasan penelitian, peneliti membatasi kajian ini pada teks pemberitaan penegakan syariat Islam dalam lingkup Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Keenam artikel berita tersebut dianalisis dengan analisis semiotika Ferdinand de Saussure.

Tabel 2. Kumpulan Berita Penegakan Syariat Islam di Harian Serambi Indonesia

No	Edisi	Judul
1	03-01-2014	Wanita Berpakaian Ketat Disemprot Cat
2	23-01-2014	Pimpinan Dayah Razia Pakaian Ketat
3	30-03-2014	WH Jaring Pemabuk dan 15 Wanita Muda
4	01-04-2014	15 Wanita Wajib Laporkan ke WH
5	26-05-2014	Tim Anti Maksiat Gerebek Tempat Karaoke
6	08-12-2014	15 Wanita Berpakaian Ketat Terjaring Razia

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap kalangan perempuan dengan berbagai latar identitas sosial dan aktif mengikuti pemberitaan syariat Islam di media massa sebagai informan penelitian di lapangan. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* yang ditentukan dengan beberapa kriteria,

yaitu khalayak perempuan yang aktif mengonsumsi Harian Serambi Indonesia, berasal dari latar belakang identitas yang beragam, peka terhadap isu gender dan wacana penegakan syariat Islam di Aceh. Adapun fokus pemaknaan yang diteliti dibatasi pada aspek aksi petugas syariat dalam penegakan syariat, razia syariat, posisi perempuan dalam kasus penegakan syariat, dan sanksi terhadap pelanggar syariat.

Tabel 3. Profil Informan

No	Informan	Pekerjaan
1	RHN	Ustazah
2	ES	Akademisi/Pengamat Sosial
3	RW	Aktivis Solidaritas Perempuan
4	AN	Model/Mahasiswa
5	IN	Akademisi/Pengkaji Gender
6	YM	Pengacara
7	PW	Pengamat Media
8	DY	Kohati Aceh

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan teknik Analisis Resepsi dengan menentukan makna dominan dalam teks pemberitaan penegakan aturan syariat Islam (*Preferred Reading*) yang ditampilkan Harian Serambi Indonesia kepada khalayak. Kemudian peneliti melihat pemaknaan khalayak dengan melakukan wawancara mendalam terhadap delapan informan penelitian untuk memberikan makna yang berbeda terhadap pemberitaan kasus-kasus penegakan syariat Islam. Peneliti lalu menganalisis pemaknaan informan penelitian terhadap pemberitaan kasus penegakan syariat Islam berdasarkan tema-tema baru yang dimunculkan oleh informan. Terakhir, peneliti mengelompokkan pemaknaan informan penelitian menjadi beberapa kategori pemaknaan (*Dominant reading*, *Negotiated Reading*, dan *Oppositional Reading*) dibanding dengan makna dominan (*Preferred Reading*) yang dimunculkan oleh Harian Serambi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Preferred Readings Harian Serambi Indonesia

Tahapan awal dari model analisis resepsi adalah menemukan pemaknaan dominan yang ditawarkan oleh Harian Serambi Indonesia dalam teks pemberitaan penegakan syariat Islam. Makna dominan dibedah dengan melihat konteks sintagmatik

dan paradigmatis dengan menggunakan pisau analisis semiotika Saussure. Melalui analisis sintagmatik teks berita, makna yang dilihat adalah makna denotasi teks berita berdasarkan keterkaitan antar setiap unsur berita dan analisis terhadap unsur 5W + 1H berita yang bersifat linear. Sedangkan melalui analisis paradigmatis, dapat dilihat makna yang dikandung teks berita secara keseluruhan berdasarkan tanda-tanda tertentu di dalam teks berita yang mempunyai kode dan maksud tertentu pula. Berikut adalah beberapa berita dan tema pemaknaan dominan dari Harian Serambi Indonesia yang dianalisis berdasarkan metode analisis semiotika Saussure:

Tabel 4. Berita Terpilih Kasus-kasus Penegakan Syariat Islam Tahun 2014

Tema	Edisi	Judul
Pakaian Perempuan sebagai Objek Pengawasan Syariat Islam	03-01-2014	Wanita Berpakaian Ketat Disemprot Cat
	23-01-2014	Pimpinan Dayah Razia Pakaian Ketat
	08-12-2014	15 Perempuan Berpakaian Ketat Terjaring Razia
Pembatasan Sikap dan Ruang Gerak Perempuan	30-03-2014	WH Jaring Pemabuk dan 15 Wanita Muda
	01-04-2014	15 Wanita Wajib Laporkan ke WH
Pengontrolan Perempuan pada Lokasi Berpotensi Maksiat	26-05-2014	Tim Anti Maksiat Gerebek Tempat Karaoke

Sumber: Hasil Analisis Data

Hasil analisis tekstual terhadap enam berita tersebut menggambarkan proses *encoding* media dengan membangun makna-makna dominan tertentu yang berhubungan dengan kasus-kasus penegakan syariat Islam di Aceh dan melibatkan kalangan perempuan. Pertama, tema mengenai *Pakaian Perempuan sebagai Objek Pengawasan Syariat Islam* muncul dalam tiga edisi pemberitaan, yaitu: 3 Januari 2014, 23 Januari 2014, dan 8 Desember 2014. Dalam teks berita pada tiga edisi ini, secara umum Harian Serambi Indonesia menampilkan kalangan perempuan sebagai pihak yang lebih dominan melanggar aturan syariat Islam. Secara umum dapat disimpulkan bahwa *preferred reading* yang ditunjukkan Harian Serambi Indonesia adalah “berpakaian ketat” bagi setiap perempuan tidak diperbolehkan. Pakaian ketat perempuan dijadikan

simbol untuk menghakimi perempuan dengan mengatasnamakan penegakan syariat Islam. Lebih lanjut, diksi “razia pakaian ketat” yang notabeneanya ditujukan kepada perempuan menjadi suatu bentuk pengawasan terhadap tubuh perempuan. Pengawasan yang dilakukan penegak syariat Islam terhadap perempuan yang berpakaian ketat adalah hal yang seharusnya dilakukan. Perempuan merupakan pihak yang harus diawasi tata cara berpakaian mereka, agar penegakan syariat Islam dapat menyeluruh.

Kedua, tema mengenai Pembatasan Sikap dan Ruang Gerak Perempuan, ditemukan pada dua edisi pemberitaan, yaitu 30 Maret 2014 dan 1 April 2014. Terdapat gambaran yang ditunjukkan Harian Serambi Indonesia mengenai para *stakeholder* yang menggeneralisasi bahwa penegakan aturan syariat Islam dan pemberian sanksi terhadap para pelanggar mana pun adalah hal yang benar. Dalam teks berita Harian Serambi Indonesia lebih dominan menggambarkan posisi perempuan sebagai sosok pelanggar utama. Adanya labelisasi negatif dan penyudutan terhadap segelintir perempuan yang terlihat dari pilihan kata dan kalimat yang digunakan di dalam teks berita di edisi ini. Beberapa kutipan kalimat seperti “...menjaring 13 wanita muda yang mangkal di sejumlah warung kopi (warkop) hingga tengah malam,” atau “...dua wanita lainnya yang diduga sebagai pekerja seks komersil”, menunjukkan bahwa ada tindakan tegas terhadap segelintir kalangan perempuan dan bentuk pelabelan negatif.

Adanya sub judul berita pada edisi 30 Maret 2014 “Dari SPG Hingga Wanita Kesepian” juga menambah kesan bahwa perempuan adalah sosok yang paling memungkinkan melanggar aturan syariat. Penekanan berita terhadap status sosial perempuan memiliki makna konotasi negatif yang mengarah kepada perilaku menyimpang segelintir perempuan. Pemaknaan dominan Harian Serambi Indonesia menggambarkan kalangan perempuan khususnya para remaja adalah pihak yang tidak layak berada di luar rumah ketika larut malam, sehingga siapa pun yang melanggar aturan ini dianggap tidak bermoral dan bersyariat.

Ketiga, tema mengenai Pengontrolan Perempuan pada Lokasi Berpotensi Maksiat muncul dalam satu edisi pemberitaan, yaitu 26 Mei 2014. Dalam teks berita edisi tersebut, Harian Serambi Indonesia menggambarkan ada beberapa tempat yang dianggap “berpotensi” terhadap pelanggaran syariat, khususnya terkait kasus-kasus khalwat. Adapun *preferred reading* yang dapat dilihat berdasarkan hasil analisis terhadap teks berita pada edisi ini adalah aksi penggerebekan yang dilakukan oleh tim

anti maksiat di beberapa tempat yang dianggap berpotensi adanya pelanggaran syariat adalah sikap yang benar. Pelanggaran syariat Islam didominasi oleh kalangan perempuan yang melanggar tata cara bersikap dan berpakaian yang sesuai dengan standar syariat. Ada stigma negatif terhadap segelintir perempuan, bahwa keberadaan perempuan di tempat-tempat tertentu seperti tempat karaoke, warung kopi, salon, atau di pinggir jalan ketika malam hari dianggap tidak lazim bagi mereka.

Maka secara keseluruhan, jika dikaitkan pada konteks penegakan aturan syariat Islam di Aceh, Harian Serambi Indonesia memiliki kekuasaan untuk menjadikan objek pemberitaannya sebagai sosok pelanggar kemudian merepresentasikannya kepada khalayak dengan membentuk suatu konstruksi makna melalui proses *decoding*, sehingga memberikan pesan untuk dapat diterjemahkan oleh khalayaknya. Seperti yang dijelaskan oleh Byerly dan Ross (2006, p. 40), bahwa cara perempuan direpresentasikan media di dalam suatu pemberitaan akan memberikan pesan penting untuk khalayak terhadap kedudukan perempuan, peran perempuan, dan kehidupan perempuan di masyarakat.

Syariat Islam merupakan isu yang sensitif untuk dibahas di media, namun demikian Harian Serambi Indonesia cenderung menonjolkan kalangan penegak hukum syariat Islam sebagai narasumber utama ketika menampilkan pemberitaan kasus pelanggaran syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya suatu dominasi kekuasaan mayoritas terhadap minoritas. Perempuan Aceh sebagai pelaku yang sering ditampilkan sebagai pelanggar justru diabaikan dalam pemberitaan melalui penggunaan bahasa yang memihak laki-laki, sehingga mereka menjadi pihak minoritas yang tidak tersalurkan sudut pandang dan pendapatnya.

Pemaknaan Perempuan Terhadap Wacana Syariat Islam di Harian Serambi Indonesia

Proses resepsi khalayak terjadi ketika khalayak menanggapi pesan yang ditawarkan oleh Harian Serambi Indonesia. Sebagai proses *decoding* makna, Harian Serambi Indonesia memproduksi teks pemberitaan kasus-kasus penegakan syariat Islam melalui serangkaian proses yang kompleks dan melibatkan banyak nilai-nilai. Dalam proses penciptaan pesan tersebut, Harian Serambi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai internal media dan nilai-nilai di luar media yang membawa suatu dominasi

ideologi. Kemudian nilai-nilai tersebut ditawarkan oleh Harian Serambi Indonesia kepada khalayak melalui teks pemberitaan. Kedelapan informan sebagai khalayak media menginterpretasi teks pemberitaan Harian Serambi Indonesia tersebut berdasarkan latar belakang yang dimilikinya, sehingga tercipta proses pemaknaan aktif khalayak terhadap pemaknaan yang ditawarkan oleh Harian Serambi Indonesia.

Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari delapan informan penelitian, terdapat kecenderungan pemaknaan informan yang berada pada kelompok *oppositional reading*, kemudian dua informan pada kelompok *negotiated reading* dan satu informan pada kelompok *dominant reading*. Sehingga secara umum, pemaknaan khalayak bertentangan dengan makna dominan yang ditawarkan oleh media mengenai konteks penegakan syariat Islam di Aceh. Pemaknaan informan mengenai proses penegakan syariat Islam di Aceh kemudian dibagi dalam dua kelompok tema pemaknaan, yaitu:

Aksi Penertiban Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kurang Sesuai dengan Aturan Formal yang Berlaku

Berdasarkan pemaknaan beberapa informan terhadap apa yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat aksi-aksi penegakan syariat Islam yang tidak sesuai dengan aturan formal yang telah disepakati bersama dalam qanun syariat Islam. Aksi tersebut terkait kewenangan pihak yang melakukan penindakan pelanggaran syariat Islam dan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggar syariat Islam di lapangan.

Pertama, terkait dengan aksi para penegak syariat dalam menertibkan pelanggaran berbusana islami yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia. Sebenarnya masyarakat Aceh sudah diwajibkan untuk patuh terhadap aturan sesuai dengan amanah Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam dalam Pasal 13 Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang Islam wajib berbusana islami”. Sehingga setiap masyarakat muslim Aceh yang tidak mematuhi aturan tersebut berhak untuk ditindaklanjuti. Hal ini disepakati oleh informan RHN sebagai pihak *dominant reading*:

“Mungkin pembatasan terhadap sikap perempuan atau pakaian ketat perempuan itu menjadi langkah awal agar pelanggaran syariat tidak dilakukan lebih parah lagi jika tidak diperhatikan dengan baik. Contohnya agar tidak berkhalwat ketika berkumpul dengan teman-temannya, atau ketika duduk di warung kopi yang dapat mengundang aksi pelanggaran SI.” (RHN, wawancara, 2016)

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, aksi tindak lanjut pelanggaran aturan berbusana islami tersebut terkadang dilakukan oleh pihak-pihak non-pemerintah yang tidak berwenang dan sesuai dengan aturan formal sehingga melewati batasan-batasan tertentu. Hal tersebut cenderung disepakati oleh tujuh informan lainnya yang tergabung dalam kelompok *oppositional reading*, seperti yang dijelaskan oleh ES dan IN:

“Bagi saya landasannya adalah jika tidak ada aturan yang sah, maka menjadi tidak benar pelaksanaannya. Walaupun bagi mereka (tim penegak syariat) dianggap sebagai suatu bentuk pendidikan, namun jika tidak ada landasan hukumnya maka tetap tidak benar. Dan kasus yang sering dimunculkan di media itu tidak ada landasan hukumnya.” (ES, wawancara, 2016)

“Apakah dengan adanya aksi semprot cat pada pakaian ketat akan membuat pelaku tersebut menjadi semakin baik, belum tentu juga. Nah, apakah aksi-aksi tersebut sudah sesuai dengan SI yang sebenarnya? Jika berbicara tentang siapa yang berwenang dalam aksi penegak SI tersebut, ada tupoksinya, seperti WH. Namun yang terlihat, justru yang berani melakukan itu bukan WH.” (IN, wawancara, 2016)

Pelaku penindakan pelanggaran syariat Islam di lapangan tidak sesuai dengan tupoksi yang diatur oleh qanun syariat Islam, contohnya seperti aksi razia pakaian ketat oleh pimpinan dayah di Lhoksukon yang diberitakan oleh Harian Serambi Indonesia. Padahal di dalam Qanun No. 11/2002 tersebut telah diatur mengenai pelaksana aksi razia pelanggaran aturan berbusana islami, yaitu tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1 berbunyi, “Untuk terlaksananya syari`at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi`ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayahul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini”. Wilayahul Hisbah (WH) adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan aksi penertiban pelanggaran syariat Islam secara resmi, sehingga jika ada pihak selain WH melakukan aksi razia tersebut dianggap di luar wewenang resmi pemerintahan dan merujuk kepada kearifan lokal setempat.

Namun Qanun No. 11/2002 memberikan wewenang kepada WH hanya untuk menegur dan menasihati para pelaku pelanggaran ketika mereka telah dicurigai melanggar syariat berdasarkan alasan yang logis. Peraturan ini tidak memberikan petugas WH wewenang untuk menangkap tersangka, melainkan menyerahkan mereka kepada Kepolisian Daerah (Polda) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNPS) jika perilaku mereka tidak berubah.

“Sebagai seorang muslimah, saya sangat menyetujui penerapan syariat Islam yang sesuai dengan standar Allah SWT. Akan tetapi, aksi syariat Islam yang diterapkan saat ini merupakan standarnya manusia. Masih pilih kasih. Jika ditemukan perempuan yang melanggar aturan berbusana islami, maka langsung diberikan hukuman dan bukan diberikan nasehat terlebih dahulu.” (DY, wawancara, 2016)

“Dalam aksi razia, perempuan lebih banyak ditangkap oleh tim penegak syariat. Mungkin karena laki-laki tidak terlalu terlihat, sedangkan perempuan secara kasat mata sangat mudah terlihat jika ada yang melanggar. Padahal, WH yang menangkap pun terkadang juga berpakaian ketat. Seharusnya mereka yang melakukan aksi, juga memakai pakaian yang benar-benar islami seperti jubah atau gamis sebelum menindaklanjuti orang lain, sehingga membuat kita segan. Yang saya lihat di lapangan, justru para WH nya tidak tegas atau menyeluruh dalam melakukan razia. Banyak juga yang melanggar aturan, tapi tidak ditangkap.[...] Sehingga masih banyak warga Aceh yang terkesan munafik. Jika diberita seakan-akan ada aksi penegak hukum SI di lapangan, tapi fakta sebenarnya belum secara menyeluruh dan tegas.” (AN, wawancara, 2016)

Kedua, mengenai pemberian sanksi oleh para penegak syariat terhadap pelanggar yang terjaring ke dalam razia. Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran aturan berbusana muslim tercantum dalam Qanun No. 11/2002 Pasal 23 yang berbunyi, “Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 1 dipidana dengan hukuman ta`zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan Wilayahul Hisbah”. Ini menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar dari yang paling rendah ke tertinggi adalah dipanggil, diperingatkan, dinasihati, kemudian ditakzir (dicambuk) jika pelanggar terus menerus mengulangi kesalahannya. Maka jika merujuk pada aturan tersebut, mengenai sanksi menyemprot cat pada pakaian ketat pelanggar aturan berbusana islami oleh pimpinan dayah daerah Lhoksukon yang diberitakan oleh Harian Serambi Indonesia tidak termasuk dalam kriteria sanksi yang telah disepakati secara tertulis dan dapat dianggap tidak sah. Hal ini disepakati oleh tujuh informan penelitian sebagai bagian dari *oppositional reading*:

“Saya pikir, sanksi seperti itu tidak mendidik. Hal seperti itu tidak membangun edukasi yang betul dalam masyarakat. Untuk membangun masyarakat yang benar-benar memahami SI tidak harus melalui pemberian sanksi-sanksi, itu bukan alternatif. Orang akan berbuat ketika dia selesai dengan pikirannya, dengan pilihan-pilihannya. Namun ketika dia dipaksa, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Apalagi terkait dengan permasalahan pakaian yang menjadi pilihan identitas orang.” (RW, wawancara, 2016)

Sedangkan mengenai sanksi terhadap pelanggar kasus *khalwat* (mesum/berduaan), diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Dalam qanun tersebut tidak disebutkan atas dasar apa penangkapan perbuatan berduaan

atau berkumpul dengan non-muhrim dapat dilakukan atau berapa lama tersangka pelanggar dapat ditahan tanpa adanya otorisasi peradilan. Sehingga terkait dengan berita Serambi Indonesia mengenai sanksi “wajib lapor” yang diberikan pihak WH Banda Aceh terhadap 15 perempuan yang diduga melanggar aturan, sebenarnya tidak memiliki dasar otorisasi yang jelas.

Hal tersebut yang disepakati oleh tujuh informan penelitian bahwa pelaku pelaksana dan sanksi syariat yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang resmi, sehingga membuat informan cenderung merasa sangsi dan tidak sepenuhnya percaya terhadap apa yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia mengenai penertiban syariat Islam di lapangan. Bahkan mereka memaknai bahwa sikap pelaku penegak hukum non-pemerintah merazia pelanggar busana islami, sanksi menyemprot pakaian ketat perempuan, dan perintah wajib lapor sejumlah perempuan yang diduga melanggar syariat kepada WH adalah sikap yang tidak layak. Dalam konteks tema ini, proses resepsi khalayak menunjukkan gambaran bahwa posisi *oppositional reading* yang ditunjukkan oleh tujuh informan lebih mendominasi daripada *dominant reading* yang hanya dari satu informan.

Pembatasan Sudut Pandang Perempuan Aceh Mengenai Kasus-kasus Penegakan Syariat Islam

Sisi lain yang dimaknai oleh tujuh dari delapan informan dalam proses resepsi adalah adanya pembatasan suara perempuan Aceh yang ditampilkan dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia berkaitan dengan kasus-kasus penertiban pelanggaran syariat yang melibatkan mereka. Menurut informan, sudut pandang yang lebih banyak ditonjolkan adalah dari pihak tim penegak syariat Islam. Sehingga membatasi suara perempuan untuk menyampaikan sudut pandang mereka tersendiri mengenai aksi penerapan syariat Islam yang melibatkan mereka.

“Ketika kasus-kasus itu terjadi, posisi para pelanggar sangat terdesak yang kemudian semakin terdesak dengan pemberitaan media. Dan di media, lagi-lagi perempuan yang cenderung bersalah dan ditampilkan. Padahal ketika dia melakukan khalwat dan sebagainya, dia tidak sendirian. Pelanggar perempuanlah yang benar-benar diekspos media dan dideskripsikan secara halus.” (PW, wawancara, 2016)

Ketiadaan sudut pandang perempuan sebagai objek yang ditonjolkan media menurut informan justru mempersulit posisi mereka di pandangan masyarakat.

Perempuan secara psikologis dipermalukan melalui teks pemberitaan media tanpa bisa mengklarifikasi alasan dari sikap yang telah mereka lakukan. Padahal, dalam aksi-aksi penerapan syariat Islam di lapangan begitu banyak hal yang tidak terekspos di media yang kemudian hanya menampilkan hal-hal yang sensasional. Bahkan, menurut kedelapan informan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam di lapangan seringnya tidak hanya melibatkan kalangan perempuan namun kalangan laki-laki juga. Namun yang terlihat di pemberitaan media hanyalah perempuan tanpa menjadikan mereka sebagai narasumber untuk dimintai keterangan.

“...tidak sekedar dilihat dari aspek busana saja, karena kekerasan tidak muncul dari permasalahan busana saja. Ketika kekerasan terhadap perempuan muncul di luar permasalahan busana, berarti ada persoalan lain yang harus diperhatikan pada pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat yang selalu berada pada kalangan laki-laki.”
(RW, wawancara, 2016)

Harian Serambi Indonesia dianggap oleh informan belum menjalankan *media policy* yang layak dalam memberitakan kasus-kasus syariat Islam. Selain tidak melibatkan keseluruhan sudut pandang dari berbagai pihak yang terlibat, Harian Serambi Indonesia juga dianggap tidak memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat dengan menampilkan berita-berita syariat Islam yang positif dan bermanfaat. Ada keberpihakan terhadap pemerintah atau tim penegak syariat Islam sehingga hal tersebut membatasi keberagaman sudut pandang, khususnya perempuan sebagai objek pemberitaan. Seharusnya Serambi Indonesia mampu mengakomodir berbagai keberagaman sudut pandang mengenai aksi penertiban kasus-kasus syariat, baik dari sisi penegak hukum, pelaku atau korban aksi, dan masyarakat umum untuk mendapatkan kajian, evaluasi dan bahan masukan terhadap proses penegakan syariat Islam yang baik di masa yang akan datang.

Mengenai bias informasi yang dilakukan oleh Harian Serambi Indonesia, dimaknai oleh sebagian informan bahwa sebagai perempuan Aceh yang juga terlibat dalam proses penerapan syariat Islam, pada dasarnya mereka bergerak sesuai dengan cara mereka masing-masing dalam menyikapi pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Hanya saja upaya mereka tersebut tidak terekspos oleh media, terlebih lagi mereka tidak memiliki kekuasaan yang lebih dalam menyampaikan aspirasi mereka. Mereka mengikuti perkembangan isu syariat Islam, mempelajarinya, dan juga mengkritisnya berdasarkan aktivitas dan latar belakang yang mereka miliki. Sudut pandang mereka mengenai pemberlakuan syariat Islam di Aceh diwakilkan melalui aktivitas-aktivitas

mereka, untuk mendukung proses penerapan syariat atau bahkan cenderung menolak ketimpangan-ketimpangan yang mereka temukan. Meskipun pada akhirnya, sudut pandang mereka tidak didengarkan oleh media.

Analisis Pemaknaan Perempuan Terhadap Pemberitaan Kasus Penegakan Syariat Islam di Harian Serambi Indonesia

Dalam sudut pandang interpretif, pengalaman subyektif individu adalah hal penting dalam memberikan interpretasi-interpretasi terhadap realitas sosial. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Neuman (2000, p. 71), kajian interpretif digunakan untuk melakukan interpretasi dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku untuk mengonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan tersebut. Spelman (1988) menjelaskan bagaimana pun setiap masyarakat memiliki kebudayaan, nilai, norma serta pengalaman yang berbeda-beda, begitu pun perempuan. Perempuan adalah sosok multikultural yang juga memiliki warna tersendiri dalam memaknai bentuk-bentuk penindasan (Gould, 1997, pp. 149-150). Begitu pula dalam pemberitaan penegakan syariat Islam, perempuan memiliki keberagaman interpretasi dalam memaknai wacana penegakan syariat Islam yang ditampilkan di media.

Sebagai informan satu-satunya dalam kelompok *dominant reading*, informan RHN memaknai perempuan dan pemberitaan kasus penegakan syariat Islam yang ada di Harian Serambi Indonesia berdasarkan posisinya sebagai seorang ustazah, bahwa hampir keseluruhan isu yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia adalah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pemaknaan RHN juga dilatarbelakangi oleh motivasinya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai syariat terhadap santri-santri didikannya. Pemberitaan di media dianggap dapat menjadi sarana informasi untuk mendidik dan memberitahukan isu syariat Islam terkini yang berkembang di Aceh. Pemahaman RHN tentang ajaran Islam secara mendalam dan kehidupan religius yang dijalannya dalam lingkungan dayah juga melatarbelakangi proses pemaknaan RHN terhadap kasus-kasus syariat Islam yang berkembang di media.

Sedangkan dua informan pada posisi *negotiated reading*, menyepakati bahwa penerapan syariat Islam adalah hal yang seharusnya dilakukan, akan tetapi dengan tidak

menyalahi aturan formal. Posisi informan ES sebagai seorang pengamat sosial dan akademisi menjadikan informan lebih memandang isu-isu syariat Islam di media secara lebih akademis. Dalam memaknai kasus-kasus pelanggaran syariat Islam dan aksi tim penegak syariat di lapangan, ES menganggap bahwa aksi tersebut layak jika sesuai dengan qanun formal yang berlaku sehingga tidak menjadi timpang dan merugikan pihak tertentu, seperti perempuan. Informan dalam memaknai juga mengedepankan ketersediaan informasi dan data yang akurat lainnya sebagai pendamping informasi yang diliput oleh media. Selain itu, informan juga beranjak dari pengalaman personal dalam menilai proses penegakan syariat Islam tidak seketat yang digambarkan media. Hal ini membuatnya tidak mudah percaya dengan apa yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia mengenai kasus-kasus pelanggaran syariat Islam dan memosisikannya sebagai khalayak dalam kelompok *negotiated reading*.

Sedangkan informan DY melakukan proses resepsi terhadap pemberitaan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam di Serambi Indonesia berdasarkan pengetahuan agama dan pengalaman hidup dalam lingkungan tempat tinggal yang masih kental dengan budaya patriarki. Berdasarkan latar belakangnya tersebut, terkait dengan syariat Islam di Aceh, DY cenderung sepatutnya dengan aksi-aksi penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Namun DY tidak setuju dengan bentuk ketidakadilan penegak syariat yang cenderung merugikan kalangan bawah, salah satunya seperti perempuan. Dari pengalaman dan pengetahuannya tentang isu syariat Islam di lapangan, DY beranggapan bahwa Harian Serambi Indonesia cenderung memihak terhadap tim penegak syariat dan mengabaikan kalangan bawah seperti pelaku dan korban dari aksi penegak syariat tersebut. Meskipun DY cenderung berpihak terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh, DY tidak sependapat dengan pengimplementasi aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam sebenarnya. Cara informan meresepsi teks menempatkannya dalam posisi *negotiated reading*.

Selebihnya, lima informan lain memiliki pemaknaan dalam kategori *oppositional reading* yang beranggapan bahwa wacana penegakan syariat Islam cenderung tidak memihak kalangan perempuan. Informan AN memberikan resepsi pada pemberitaan Serambi Indonesia berdasarkan latar belakang pekerjaannya sebagai model, mahasiswa, dan juga pendatang yang berasal dari Kota Bandung. Proses resepsi didasari latar belakang status sosial dan asal usul tempat tinggal informan. Dalam memaknai syariat

Islam dan penertiban kasus-kasus syariat Islam di Aceh, AN cenderung memperlihatkan ketidaksetujuannya yang menunjukkan bahwa ia menolak makna yang ditawarkan oleh Harian Serambi Indonesia. Informan menganggap bahwa proses penerapan syariat Islam oleh pemerintah tidak bisa bersifat memaksa dan harus berlandaskan akan kesadaran masing-masing perempuan. Berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai model, AN melihat masih banyak perempuan Aceh yang berpakaian tidak sesuai standar syariat. Bahkan tidak konsisten dalam memakai pakaian islami ketika berada di luar Aceh. Pengalaman dan pandangan AN mengenai syariat Islam tersebut berpengaruh terhadap proses resepsinya dalam menanggapi isu-isu penertiban kasus pelanggaran syariat di Harian Serambi Indonesia.

RW memaknai pemberitaan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam di Harian Serambi Indonesia berdasarkan pengalamannya sebagai seorang aktivis perempuan. Latar belakang RW yang aktif dalam kegiatan pergerakan perempuan di lembaga Solidaritas Perempuan dan Balai Syura Inong Aceh, mempengaruhi proses pemaknaannya tentang posisi perempuan dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia tersebut. Menurut pengalaman yang dimilikinya selama beraktivitas sebagai aktivis perempuan dan berjuang untuk pemenuhan hak-hak perempuan Aceh, dalam proses penerapan syariat Islam yang ditemukan di lapangan masih banyak bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bentuk diskriminasi tersebut kemudian diperkuat dengan adanya pemberitaan di media. Dengan nilai-nilai sensitivitas gender yang dimiliki RW, mengenai kasus-kasus pelanggaran syariat Islam yang diberitakan di Serambi Indonesia dan banyak menyoroti perempuan ia memaknai bahwa perempuan bukan menjadi pelanggar melainkan korban dari aksi penegakan syariat. Hal ini bertolak belakang dengan makna dominan yang ditawarkan oleh Serambi Indonesia yang cenderung memosisikan perempuan sebagai pelanggar dan landasan moral penegakan syariat Islam.

IN cenderung memaknai pemberitaan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam di Serambi Indonesia berdasarkan latar belakangnya sebagai seorang akademisi, peneliti dan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry. Posisi tersebut membuat ia peka terhadap permasalahan-permasalahan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya berkaitan dengan kasus-kasus syariat Islam di Aceh. Terkait dengan isu syariat Islam dan perempuan IN berusaha memberikan solusi dan evaluasi

terhadap permasalahan dan bentuk-bentuk ketimpangan yang ditemukan dari kajian-kajian lapangan. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan hasil-hasil pengamatan mengenai perempuan dan syariat Islam, IN beranggapan bahwa dalam penerapan syariat Islam masih banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan terhadap perempuan baik dari sisi pembentukan qanun dan implementasi di lapangan. Hal tersebut berpengaruh terhadap caranya memaknai berita yang ditampilkan Harian Serambi Indonesia mengenai kasus-kasus syariat Islam yang menampilkan kembali isu-isu di lapangan. Sehingga pemaknaannya cenderung berbeda bahkan bertolak belakang dengan makna dominan yang ditawarkan oleh Harian Serambi Indonesia.

PW cenderung memaknai pemberitaan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam di Harian Serambi Indonesia berdasarkan latar belakangnya sebagai pengamat media. Pengetahuannya tentang ilmu media membuat PW lebih teliti dan cermat dalam memaknai wacana syariat Islam yang berkembang di Harian Serambi Indonesia. Menurutnya, ada bentuk-bentuk ketimpangan dalam cara Harian Serambi Indonesia menampilkan kasus-kasus syariat Islam. Harian Serambi Indonesia terkesan lebih banyak memberitakan kasus-kasus negatif yang bertemakan maksiat dan minim prestasi. Banyak teks pemberitaan Harian Serambi Indonesia yang ia anggap cenderung menyudutkan kalangan perempuan dalam kasus-kasus syariat Islam, seperti pemilihan judul yang sensasional, foto yang menampilkan secara jelas sosok perempuan, dan pilihan kata yang langsung memberikan justifikasi dan labelisasi sepihak terhadap sekelompok perempuan. Latar belakang dirinya sebagai akademisi tersebut mempengaruhi pemaknaan PW terhadap Harian Serambi Indonesia yang cenderung berbeda dan bertolak belakang dengan makna dominan yang ditawarkan.

Sebagai seorang pengacara yang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan advokasi di lapangan, YM memiliki cara tersendiri dalam memandang isu-isu syariat Islam yang berkembang di media. Pengalamannya melihat langsung realitas yang ada di lapangan mengenai kasus-kasus syariat Islam dianggap YM rentan dengan bentuk-bentuk kekerasan dan ketidakadilan, terlebih lagi dalam penertiban kasus-kasus khalwat/mesum yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan non-pemerintah. Sesuai dengan pengetahuan umumnya tentang advokasi dan hukum, kasus-kasus penertiban pelanggaran syariat Islam dalam masyarakat tersinyalir dengan pelanggaran HAM. Banyak perempuan yang menjadi korban dari aksi penegakan hukum syariat dengan cara dipermalukan di depan

umum setelah dilakukan penggerebekan, sehingga berdampak pada psikologis perempuan. Latar belakang pengetahuannya tersebut mengenai realitas yang ditemukan langsung di lapangan, berpengaruh terhadap proses pemaknaannya mengenai pemberitaan pelanggaran syariat Islam di Harian Serambi Indonesia.

Menurut McQuail (1997), analisis resepsi menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya dan sebagai proses dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas pengalaman dan produksi. Hasil penelitian ini merupakan representasi suara khalayak yang mencakup identitas sosial dan posisi subyek.

Dari hasil wawancara mendalam terhadap kedelapan informan, peneliti menemukan beberapa latar belakang yang mempengaruhi adanya bentuk-bentuk resepsi, terhadap wacana penegakan syariat Islam di Harian Serambi Indonesia. Pertama, intensitas pemahaman agama. Kapasitas pemahaman agama informan menjadi latar belakang yang berpengaruh terhadap sikap informan dalam mengkritisi ketidakadilan kebijakan penegakan syariat Islam di Aceh. Informan dalam posisi *dominant reading* dan *negotiated reading* merupakan kalangan perempuan yang menilai realitas penegakan syariat Islam di Harian Serambi Indonesia berdasarkan konteks keagamaan, berbeda dengan informan lain dalam kelompok *oppositional reading* yang cenderung memaknai dari pemahaman universal. Kedua, aktivitas sosial. Informan memiliki aktivitas sosial yang berbeda-beda dan berpengaruh terhadap cara pandang dan kepekaan mereka untuk menyikapi bentuk-bentuk ketidakadilan dalam wacana penegakan syariat Islam di Harian Serambi Indonesia. Kebanyakan perempuan dalam kelompok *oppositional reading* merupakan para aktivis, akademisi atau bagian dari organisasi sosial. Ketiga, latar belakang budaya. Budaya sangat berpengaruh terhadap sikap informan dalam meresepsi wacana penegakan syariat Islam yang ditekankan oleh Harian Serambi Indonesia, sesuai dengan kebiasaan yang dijalankan dan ditanamkan dalam keseharian informan sebagai perempuan Aceh. Keempat, pengalaman masing-masing perempuan ketika berhadapan langsung dengan kasus-kasus penegakan syariat Islam. Perempuan yang pernah terlibat langsung dengan proses penegakan syariat Islam di lapangan memiliki perspektif yang lebih objektif dalam memaknai pemberitaan syariat Islam yang ditampilkan oleh Harian Serambi Indonesia.

Penutup

Poin utama dalam kajian resepsi media adalah menemukan bahwa khalayak secara terbuka dapat memberikan interpretasi atas makna yang ditawarkan oleh media. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap delapan informan penelitian, pemaknaan perempuan terhadap wacana penegakan syariat Islam di media menunjukkan bahwa perempuan sebagai audiens dapat dilihat sebagai bagian dari *interpretative communities* yang selalu aktif dalam meresepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar menjadi individu pasif yang menerima begitu saja makna yang diproduksi oleh media massa. Proses resepsi delapan perempuan terhadap teks pemberitaan penegakan syariat Islam di Harian Serambi Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun kecenderungan informan berada pada posisi *oppositional reading*, terutama dalam memaknai posisi perempuan dalam teks pemberitaan dan kasus penegakan syariat, tetapi dalam aspek urgensi penerapan syariat ada beberapa informan yang cenderung dapat bernegosiasi bahwa proses syariat Islam memang harus diterapkan di Aceh sehingga dapat dikelompokkan pada kriteria *negotiated reading*. Berbagai pemaknaan yang dimunculkan informan tersebut merupakan interpretasi nyata atas pengalaman-pengalaman yang dilalui perempuan juga menjadi bukti terhadap yang dijelaskan Spelman (1988) bahwa perempuan adalah dirinya sendiri, yang artinya setiap perempuan memahami dirinya sendiri untuk bersikap dan memahami lingkungannya.

Sebagai rekomendasi, hasil kajian ini dapat menjadi masukan terhadap pembuat kebijakan di Aceh terutama dalam merumuskan kebijakan syariat Islam ramah perempuan. Juga menjadi masukan kepada pihak media untuk lebih peka danimbang dalam memberitakan kasus-kasus penerapan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Aliansi Jurnalistik Independen. (2012). *Sebatas Corong, Kurang Etika*. Dalam *Sharia News Watch ed. 2*. Banda Aceh: Cipta Media Bersama
- Byerly, C. M., & Ross, K. (2006). *Women and Media: A Critical Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Febrian, F. (2012). Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang Terhadap Tayangan Iklan Televisi Layanan SMS Premium Versi Ramalan Paranormal. *Jurnal The Messenger*, 4(2), 50-58.
- Davis, H. (2004). *Understanding Stuart Hall*. London: Sage Publication.
- Fitri, A. (2015). *Pemaknaan Masyarakat Non-Muslim di Banda Aceh Terhadap Pemberitaan Qanun Jinayah (Hukum Pidana) di Harian Serambi Indonesia*. (Thesis), Universitas Diponegoro.
- Gould, C. C. (1997). *Gender: Key Concepts in Critical Theory*. New York: Humanity Book.

- Hadi, I. P. (2009). Penelitian Khalayak dalam Perspektif Reception Analysis. *Jurnal Ilmiah Scriptura*, 2(1), 1-7.
- Jensen, K. B. (2002). *Handbook of Media and Communication Research, Qualitative and Quantitative Methodologies*. London: Routledge.
- Marris, P., & Thornham, S. (1986). *Media Studies a Reader 2ed*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- Maulina, P. (2017a). Pembungkaman Terhadap Perempuan Dalam Teks Pemberitaan Syariah Islam. *Bidayah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 120-133.
- Maulina, P. (2017b). Relasi Kekuasaan Dalam Wacana Penerapan Qanun Jinayat Di Aceh. *Jurnal Source*, 243-250.
- McQuail, D. (1997). *Audience Analysis*. London: Sage Publication.
- Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Nisa, U. (2017). Studi Resepsi Khalayak terhadap Pemberitaan Syariah Islam pada Kompas.com. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(1), 74-89.
- Krolokke, C., & Sorensen, A.S. (2006). *Gender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance*. California: Sage Publications.
- Spelman, E. V. (1988). *Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminism Thought*. Boston: Beacon Press.